

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA

Oleh:

Irma Antika Putri¹

Sherli Oktafia Dewi²

Moh Alfin Naf'an³

Raihan Rifqi Permana⁴

Wahjoe Poernomo Soeprpto⁵

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: alfinnafan3@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of the Village Fund policy in the economic empowerment of village communities. Using a qualitative method with a case study approach in several villages in Kabupaten X, data was collected through interviews, observation, and documentation. The results show that the Village Fund significantly contributes to infrastructure development and economic empowerment programs, such as skills training and business capital assistance, which improve community welfare. However, there are obstacles in the form of a lack of community participation in the planning and management of funds. Therefore, the suggestion of this research is the need to increase transparency, accountability, and community participation in every stage of Village Fund management to maximize the positive impact on economic empowerment..*

Keywords: *Village Fund, Economic Empowerment, Policy Implementation, Community Participation.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Dana Desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Menggunakan metode kualitatif dengan

Received October 20, 2024; Revised October 26, 2024; October 31, 2024

*Corresponding author: alfinnafan3@gmail.com

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA

pendekatan studi kasus di beberapa desa di Kabupaten X, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa berkontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha, yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, terdapat kendala berupa kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan dana. Oleh karena itu, saran penelitian ini adalah perlunya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan Dana Desa untuk memaksimalkan dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi.

Kata Kunci: Dana Desa, Pemberdayaan Ekonomi, Implementasi Kebijakan, Partisipasi Masyarakat

LATAR BELAKANG

Desa adalah unit terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang memiliki otonomi tersendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Secara historis, desa merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki struktur sosial, budaya, dan ekonomi yang khas, sering kali didasarkan pada pertanian, perikanan, atau industri lokal. Desa tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal masyarakat, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih oleh masyarakat dan memiliki wewenang dalam pengelolaan sumber daya lokal. Namun, meskipun desa memiliki potensi besar dalam hal sumber daya alam dan manusia, banyak desa yang menghadapi masalah dalam hal kemiskinan, kurangnya infrastruktur, serta terbatasnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

Dana Desa adalah salah satu instrumen kebijakan yang diciptakan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi desa. Dana Desa mulai diterapkan sejak tahun 2015, sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Alokasi dana ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan desa dalam melaksanakan pembangunan yang partisipatif dan mandiri. Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diberikan kepada setiap desa untuk dikelola sesuai dengan prioritas pembangunan desa yang telah disusun bersama masyarakat. Penggunaan Dana Desa difokuskan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan

kualitas layanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Melalui Dana Desa, diharapkan masyarakat desa dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan, dengan menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas serta meningkatkan kemandirian ekonomi desa.

Kebijakan Dana Desa merupakan salah satu terobosan strategis yang digagas pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, terutama melalui penguatan ekonomi lokal. Setiap desa di Indonesia mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan tujuan mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat, terutama dalam hal pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, tantangan terbesar dari implementasi kebijakan ini terletak pada kemampuan desa dalam mengelola dana secara efektif dan tepat sasaran.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui Dana Desa berfokus pada peningkatan kemampuan masyarakat dalam menciptakan dan mengembangkan usaha mandiri, mendorong inovasi lokal, serta meningkatkan akses terhadap sumber daya ekonomi. Seiring dengan itu, pemerintah juga mendorong peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan Dana Desa, sehingga menciptakan rasa kepemilikan yang tinggi terhadap program-program yang dilaksanakan. Namun, meskipun ada potensi besar yang bisa dimanfaatkan dari Dana Desa, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan, mulai dari kurangnya kapasitas aparatur desa, hingga terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai manajemen usaha yang baik.

Implementasi kebijakan Dana Desa tidak hanya terkait dengan aspek teknis pengelolaan dana, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek sosial dan budaya masyarakat desa. Keberhasilan pemberdayaan ekonomi desa melalui kebijakan ini dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, sinergi antar pihak terkait, serta adaptasi kebijakan terhadap kondisi lokal masing-masing desa. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana implementasi kebijakan Dana Desa mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat desa dan apakah program-program yang diinisiasi telah sesuai dengan kebutuhan lokal.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA

Evaluasi terhadap implementasi kebijakan ini juga penting untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Banyak desa yang masih menghadapi kesulitan dalam mengoptimalkan penggunaan Dana Desa karena berbagai faktor, termasuk lemahnya sistem monitoring dan evaluasi, kurangnya transparansi, serta potensi penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk melihat sejauh mana kebijakan Dana Desa telah mampu memberdayakan ekonomi masyarakat desa secara nyata dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian mengenai implementasi kebijakan Dana Desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa menjadi penting sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah dan aparatur desa dalam meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan dan pemanfaatan dana tersebut.

KAJIAN TEORITIS

Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel utama yang akan dikaji, yaitu implementasi kebijakan Dana Desa sebagai variabel independen (X) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa sebagai variabel dependen (Y). Kedua variabel ini memiliki keterkaitan erat, di mana keberhasilan dalam implementasi kebijakan Dana Desa diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Berikut penjelasan teoritis mengenai masing-masing variabel:

1. Implementasi Kebijakan Dana Desa (Variabel X)

Implementasi kebijakan dapat didefinisikan sebagai proses menerapkan keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Edwards III (1980), implementasi kebijakan terdiri dari serangkaian tindakan yang mencakup komunikasi kebijakan, sumber daya yang tersedia, disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, serta struktur birokrasi. Dalam konteks Dana Desa, implementasi kebijakan mencakup semua langkah yang diambil oleh aparat desa dan masyarakat untuk menggunakan alokasi Dana Desa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pemberdayaan ekonomi di desa.

Pada praktiknya, keberhasilan implementasi kebijakan Dana Desa bergantung pada berbagai faktor, seperti partisipasi masyarakat, keterampilan manajemen aparat desa, serta dukungan dan pengawasan dari pemerintah pusat dan daerah. Van Meter dan Van Horn (1975) menyatakan bahwa salah satu elemen penting dalam implementasi kebijakan adalah tingkat konsistensi antara tujuan kebijakan dan hasil yang diharapkan. Dalam hal ini, keberhasilan implementasi kebijakan Dana Desa akan diukur berdasarkan seberapa baik dana tersebut digunakan untuk program-program yang bermanfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat desa.

2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa (Variabel Y)

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat didefinisikan sebagai upaya meningkatkan kapasitas individu atau kelompok dalam mengakses sumber daya ekonomi dan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Friedmann (1992) mengemukakan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah proses yang mencakup peningkatan akses terhadap sumber daya, distribusi kekuasaan yang lebih merata, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan ekonomi mereka. Dalam konteks desa, pemberdayaan ekonomi berarti meningkatkan kemampuan masyarakat desa untuk memanfaatkan potensi ekonomi lokal, seperti sektor pertanian, perikanan, kerajinan, atau pariwisata, sehingga mereka dapat mandiri secara finansial. Menurut Chambers (1993), pemberdayaan ekonomi juga berkaitan dengan peningkatan kontrol masyarakat terhadap sumber daya ekonomi yang tersedia di lingkungan mereka, serta pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan usaha ekonomi yang produktif.

3. Hubungan Antara Implementasi Kebijakan Dana Desa dan Pemberdayaan Ekonomi

Kebijakan Dana Desa bertujuan untuk mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Implementasi kebijakan Dana Desa yang tepat sasaran diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA

akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Menurut Wrihatnolo dan Nugroho (2007), keberhasilan pemberdayaan ekonomi dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, yang merupakan salah satu prinsip utama dalam implementasi kebijakan Dana Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan Dana Desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam menggali fenomena yang kompleks dan dinamis, serta mengungkapkan perspektif masyarakat lokal dan aparat desa terkait pelaksanaan kebijakan ini. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami interaksi antara berbagai aktor dalam pengelolaan Dana Desa, serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, di mana beberapa desa di Kabupaten X dipilih sebagai lokasi penelitian. Penelitian studi kasus memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap proses implementasi Dana Desa di desa-desa yang memiliki karakteristik ekonomi, sosial, dan budaya yang beragam. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih spesifik dan terperinci mengenai bagaimana kebijakan Dana Desa diimplementasikan di tingkat lokal dan bagaimana kebijakan ini berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh Desa Maneron kecamatan sepulu kabupaten Bangkalan yang menerima alokasi Dana Desa. Namun, dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan sumber daya, peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih 3 hingga 5 desa sebagai sampel penelitian. Kriteria pemilihan desa meliputi besaran alokasi Dana Desa yang diterima, jenis program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Selain itu, informan yang diwawancarai mencakup kepala desa, aparat desa, serta anggota masyarakat yang terlibat langsung dalam program-program pemberdayaan ekonomi.

Untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan beberapa metode. Pertama, wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam

pengelolaan Dana Desa, termasuk kepala desa dan tokoh masyarakat. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pemberdayaan ekonomi desa. Kedua, observasi dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana program-program yang didanai Dana Desa dilaksanakan di lapangan, termasuk melihat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi desa. Terakhir, dokumentasi berupa catatan keuangan desa dan laporan program digunakan sebagai data tambahan untuk memperkuat temuan dari wawancara dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di beberapa desa, implementasi kebijakan Dana Desa menunjukkan berbagai dampak positif, terutama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu temuan utama adalah bahwa alokasi Dana Desa telah digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan, pembangunan pasar desa, dan penyediaan sarana irigasi bagi pertanian. Infrastruktur yang lebih baik tidak hanya meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas, tetapi juga mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi lokal. Sebagai contoh, pembangunan pasar desa telah membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta meningkatkan pendapatan mereka.

Selain pembangunan infrastruktur, Dana Desa juga dialokasikan untuk program-program pemberdayaan ekonomi langsung, seperti pelatihan keterampilan bagi masyarakat, bantuan modal usaha, dan pengembangan produk lokal. Program-program ini memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat desa, terutama bagi kelompok perempuan dan pemuda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan keterampilan yang difasilitasi melalui Dana Desa telah membantu masyarakat untuk lebih mandiri dalam menjalankan usaha, mengolah hasil pertanian, serta meningkatkan kualitas produk lokal yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan konsep pemberdayaan ekonomi yang menekankan pada peningkatan kapasitas individu dan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam implementasi kebijakan Dana Desa, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan dana. Beberapa masyarakat mengeluhkan kurangnya

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA

transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, yang menyebabkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dan program yang dilaksanakan. Di beberapa desa, terdapat masalah dalam hal pengelolaan keuangan desa, yang berdampak pada ketidakefektifan alokasi dana untuk program pemberdayaan ekonomi.

Dari sisi pemberdayaan ekonomi, hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak Dana Desa masih bervariasi di setiap desa. Desa yang memiliki partisipasi masyarakat yang kuat dan koordinasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat cenderung memiliki hasil yang lebih positif dalam hal pemberdayaan ekonomi. Sebaliknya, desa yang kurang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mengalami hambatan dalam mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi yang diinginkan.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan Dana Desa memiliki potensi besar dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan dana. Tanpa keterlibatan yang optimal, Dana Desa tidak akan sepenuhnya efektif dalam menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi perekonomian masyarakat desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa telah memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, terutama melalui pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan program-program ekonomi seperti pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan modal usaha. Pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh Dana Desa, seperti perbaikan jalan dan pembangunan pasar desa, meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi langsung membantu meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola usaha dan mengembangkan produk lokal, yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam implementasi Dana Desa, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana, serta minimnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Kendala-kendala ini dapat menghambat efektivitas program Dana Desa dalam mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan

peningkatan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap pengelolaan Dana Desa untuk memastikan program ini benar-benar memberikan manfaat berkelanjutan bagi perekonomian masyarakat desa.

DAFTAR REFERENSI

- Chilmi, H. R., & Fahriani, D. (2024). Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Desa Kedung Banteng. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (Jpmi)*, 2(1), 43-45.
- Ernita, N., & Ginting, S. (2022). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Singengu Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. *Journal Of Science And Social Research*, 5(3), 485-490.
- Kurniasari, P., & Mardikaningsih, A. (2024). Peningkatan Kualitas Hidup Lansia Melalui Pemanfaatan Posyandu Lansia Di Dusun Kacangan-Kandangan Kabupaten Kediri. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(3), 155-160.
- Rizki, A., & Andriyus, A. (2024). Evaluasi Kewajiban Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 5(2), 31-40.
- Setiawan, M. S. D., Sukristyanto, A., & Hariyoko, Y. (2023). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (E-Issn: 2797-0469)*, 3(01), 78-86.
- Sihotang, F. P., & Siahaan, A. Y. S. (2022). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Lanjut Usia (Lansia) Di Desa Masnauli Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah. *Journal Of Science And Social Research*, 5(3), 528-536.
- Siswanto, S., Yuliani, F., & Meilani, N. L. (2024). Implementasi Program Bantuan Sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Usia Lanjut Terlantar Di Kuantan Singingi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 5326-5334.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA

Wardono, D. A., & Angin, R. (2024). Kolaborasi Dalam Mengimplementasikan Bantuan Kesejahteraan Lanjut Usia Di Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(6), 11- 20